

# Motivasi dan Kendala Investasi di Batam

Muhammad Zaenuddin

\* Politeknik Batam

Program studi Akuntansi

Parkway Street, Batam Centre, Batam 29461, Indonesia

E-mail: zaen@polibatam.ac.id

## Abstract

*The research is aimed to identify the motivation and obstacles of investment as well as to analyze factors influencing investment decisions in the industrial estates in Batam. 25 companies and the management from 8 industrial estates are selected as respondents using convenience sampling. The result of this research indicates that the major motivation of choosing investment location in Batam are labor factor, cost, licensing administration, the importance of tax incentive, the importance of FTZ in Batam, contiguity to Singapore and market factors. Other reasons are the availability of skilled and woman labors, electricity, export and access to regional /global markets, rental cost, and also port facility. Investment constraint is administrative affair and licensing and also uncertainty of the implementation of FTZ in Batam. While according to industrial area management, investment constraints that require to be corrected are bureaucracy problems, high cost economics, taxation, customs, immigration, labor, and land problems*

**Keywords :** *motivation and obstacles of investment, industrial estates, FTZ, investment constraint*

## 1. Pendahuluan

Dalam konteks pembangunan nasional maupun regional, investasi memegang peran penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (Yonathan,2003). Dalam teori ekonomi pembangunan diketahui bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dan investasi mempunyai hubungan timbal balik yang positif.

Hubungan timbal balik tersebut terjadi oleh karena di satu pihak, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara, berarti semakin besar bagian dari pendapatan yang bisa ditabung, sehingga investasi yang tercipta akan semakin besar pula. Dalam kasus ini, investasi merupakan fungsi dari pertumbuhan ekonomi. Di lain pihak, semakin besar investasi suatu negara, akan semakin besar pula tingkat pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai. Dengan demikian, pertumbuhan merupakan fungsi investasi.

Peningkatan investasi membawa dampak positif bagi perekonomian. Investasi baru akan membuka lapangan pekerjaan, yang akan membantu menurunkan pengangguran. Peningkatan pertumbuhan investasi akan meningkatkan pertumbuhan pendapatan nasional (Jamli,1998). Peningkatan investasi memiliki dampak ekonomi di antaranya peningkatan *skill* tenaga kerja dengan adanya *training* yang oleh perusahaan asing untuk memenuhi *skilled labour*. Selain itu investasi akan berdampak pada peningkatan produktivitas sumber-sumber daya, misalnya, adanya *trained labour* yang dipekerjakan pada perusahaan domestik. Keberadaan perusahaan asing yang memiliki pengetahuan teknologi unggul akan memberikan dorongan bagi perusahaan lokal untuk lebih rajin dalam melakukan penelitian dan pengembangan yang akan mempercepat kemajuan teknologi (Theresia, 1998).

Dalam kebijakan Pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono-Yusuf Kalla sekarang ini, kebijakan investasi merupakan skala prioritas yang hampir selalu disampaikan dalam berbagai forum,

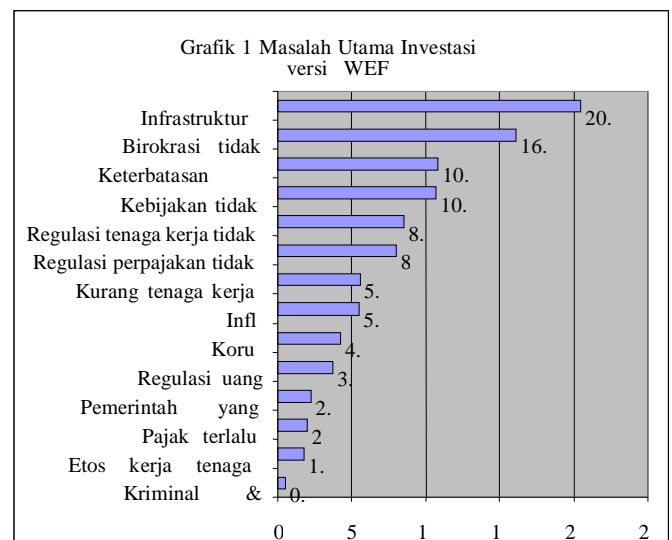
antara lain pada tanggal 23 Agustus 2006 dalam rapat paripurna DPD-RI, pemerintah menegaskan bahwa tanpa investasi mustahil kita dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tanpa pertumbuhan ekonomi, mustahil pula kita akan mampu mengurangi angka pengangguran (Yudhoyono,2006). Kebijakan ini sesuai dengan tiga strategi dalam bidang ekonomi (*triple strategy*) yang dijanjikan dalam awal pemerintahannya yakni mencapai pertumbuhan ekonomi 6,5 persen per tahun, menggerakkan kembali sektor riil, serta revitalisasi pertanian dan perekonomian pedesaan. Namun, setelah lebih dari separo masa pemerintahannya, Yudhoyono mengakui iklim dunia usaha, yang mampu menggerakkan sektor riil dan meningkatkan investasi, belum kondusif seperti yang diharapkan (Kuncoro,2005).

Secara umum investasi atau penanaman modal, baik dalam bentuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) tergantung dari daya tarik daerah dan negara, membutuhkan adanya iklim yang sehat dan kemudahan serta kejelasan prosedur penanaman modal. Menurut Tambunan (2006) terdapat sejumlah faktor yang sangat berpengaruh pada baik-tidaknya iklim berinvestasi di Indonesia. Faktor-faktor tersebut tidak hanya menyangkut stabilitas politik dan sosial, tetapi juga stabilitas ekonomi, kondisi infrastruktur dasar (listrik, telekomunikasi dan prasarana jalan dan pelabuhan), berfungsinya sektor pembiayaan dan pasar tenaga kerja (termasuk isu-isu perburuhan), regulasi dan perpajakan, birokrasi (dalam waktu dan biaya yang diciptakan), masalah *good governance* termasuk korupsi, konsistensi serta adanya kepastian dari kebijakan pemerintah.

Beberapa studi menemukan beberapa hal yang menjadi permasalahan investasi. Laporan Bank Dunia mengenai iklim investasi (World Bank, 2005) mengatakan terdapat empat faktor terpenting dalam menarik investasi, antara lain stabilitas ekonomi makro, tingkat korupsi, birokrasi, dan kepastian kebijakan ekonomi. Sedangkan menurut *The World Economic Forum* (WEF) dalam *The Global Competitiveness Report* menemukan tiga faktor penghambat bisnis yaitu birokrasi yang tidak efisien, infrastruktur yang buruk, dan regulasi perpajakan.

Begitu juga studi yang dilakukan oleh KPPOD (2003) tentang Peningkatan Daya Tarik Investasi tahun terhadap 156 kabupaten/kota di Indonesia terdapat dari 5 (lima) faktor utama pembentuk daya tarik investasi daerah yaitu faktor kelembagaan, faktor sosial politik, faktor ekonomi daerah, faktor tenaga kerja dan produktifitas serta faktor infrastruktur fisik.

Hasil survei JETRO (2006) mengenai faktor-faktor penghambat pertumbuhan bisnis atau investasi di sejumlah negara di Asia yang menunjukkan bahwa masalah utama investasi di Indonesia secara berturut-turut adalah upah makin mahal, permasalahan perpajakan, ketidakjelasan kebijakan dan kerumitan prosedur perdagangan, kondisi infrastruktur yang buruk serta isu tenaga kerja/buruh. Di Malaysia dan Singapura, upah yang mahal juga merupakan permasalahan paling besar yang dihadapi pengusaha. Di Thailand faktor terbesar adalah prosedur perdagangan yang rumit, sedangkan di Filipina, Vietnam, dan India, faktor terbesar adalah infrastruktur yang buruk.



Sumber : WEF (2007)

Studi lainnya yakni survei WEF (2007) menunjukkan bahwa masalah utama yang dihadapi pengusaha di Indonesia berturut-turut adalah masalah infrastruktur yang buruk, birokrasi yang tidak efisien, akses dana terbatas, kebijakan yang tidak stabil, dan perpajakan. Buruknya kondisi infrastruktur di Indonesia pernah dilaporkan oleh WEF (2004,2005)

yang menunjukkan kualitas infrastruktur secara keseluruhan periode 2004-2005, Indonesia berada pada peringkat ke 44 dari 104 negara yang masuk di dalam sampel, dan posisinya bertambah buruk untuk periode 2005-2006 yang menurun ke 66 dari 117 negara.

Sedangkan menurut Tambunan (2006) masalah perburuan merupakan problematika investasi yang paling serius. Permasalahannya adalah tingkat upah yang terus meningkat akibat penerapan kebijakan upah minimum, kualitas sumber daya manusia yang rendah, termasuk rendahnya penguasaan atas teknologi, hingga hubungan industrial belakangan ini semakin memperburuk keunggulan komparatif Indonesia dalam tenaga kerja. Hubungan industrial merupakan salah satu titik rawan dalam daya saing perekonomian Indonesia. Sering terjadinya pemogokan akan membuat kerugian besar bagi perusahaan-perusahaan, dan hal ini jelas akan menghilangkan niat calon investor untuk berinvestasi di Indonesia.

Permasalahan lainnya adalah birokrasi dan perijinan. Menurut Kuncoro (Kuncoro,2005) lingkungan perijinan Indonesia memang terus disorot. Survei UNCTAD (2004) dengan judul *World Investment Report 2004*, mencatat peringkat Indonesia berada dalam papan terbawah nomor 2 dari 140 negara dilihat dari indeks kinerja investasi. Hal ini dikarenakan waktu untuk mengurus ijin investasi masih dikeluhkan terlalu lama, prosedur ekspor yang lambat dan kompleks sehingga membuat biaya logistik dan transpor menjadi tidak kompetitif, ditambah korupsi yang masih berlanjut di bea cukai dan pelabuhan.

Bagaimana posisi daya saing investasi Indonesia dibandingkan dengan negara lainnya. Laporan dari UNCTAD (2004) menyajikan peringkat sepuluh (10) besar negara-negara penerima PMA di Asia dan Pasifik dimana China (termasuk Hong Kong) merupakan negara penerima terbesar, yang mencerminkan daya saing investasi dari negara tersebut paling tinggi di kawasan tersebut. Di dalam kelompok ASEAN, hanya Singapura, Malaysia dan Thailand yang masuk dalam top 10. Tercatat bahwa China dan India sebagai pendatang baru di dalam

perdagangan regional yang sangat berpotensi menjadi dua kekuatan ekonomi global merupakan tujuan penting PMA.

Menurut laporan *WEF* (2006-2007) tentang persaingan global menunjukkan bahwa peringkat daya saing Indonesia dinilai tetap terendah dibandingkan negara-negara di Asia. Posisi Indonesia berada di bawah negara Singapura (urutan ke-5), Jepang (ke-7), Malaysia (ke-26), Thailand (ke-35), dan India (ke-43). Bahkan survei sebelumnya oleh *International Institute for Management Development* menunjukkan Indonesia terpuruk pada peringkat ke-60 dari 61 negara.

Melihat gambaran permasalahan di atas terlihat bahwa problematika investasi di Indonesia sangat kompleks. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk berupaya meningkatkan daya saing nasional terutama agar dapat menarik PMA ke Indonesia. Salah satu upaya dan terobosan baru untuk peningkatan daya saing regional dan dinamika global serta mendorong tumbuhnya investasi, melalui Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yakni menetapkan Batam sebagai kawasan *Free Trade Zone*.

Ditetapkannya Batam sebagai daerah FTZ karena tidak terlepas dari keunggulan yang dimiliki oleh Batam selama ini. Di samping memiliki keunggulan geografis yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia, Batam dianggap memiliki keunggulan secara ekonomi, antara lain sebagai salah satu daerah di Indonesia yang tidak pernah mengalami krisis ekonomi, dikenal sebagai sentra industri elektronika terkemuka di Indonesia, serta merupakan penyumbang ekspor nonmigas kedua terbesar setelah Bali (Kuncoro,2005).

Pesatnya perkembangan industri dan investasi di Batam diiringi dengan bertambahnya kawasan industri baru yang menjadi sentra-sentra pertumbuhan industri di Batam. Sampai akhir tahun 2006, terdapat 25 kawasan industri yang tersebar di beberapa lokasi di Batam. Untuk peningkatan daya tarik investasi, pengelola kawasan industri melengkapi berbagai fasilitas di dalam kawasan industri antara lain ketersediaan *dormitori* bagi

karyawan, sarana publik, ketersediaan *utilitas*, jasa *maintenance* serta kemudahan dalam akses transportasi ke pelabuhan dan bandara (Otorita Batam, 2006). Dengan ditetapkannya FTZ di Batam, pemerintah pusat/daerah, Otorita Batam, pengusaha dan pengelola kawasan berupaya memanfaatkan momentum tersebut untuk dapat meningkatkan daya saing Batam agar dapat menarik PMA ke Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi alasan atau motivasi memilih lokasi investasi bagi perusahaan dalam kawasan industri di Batam serta apa yang menjadi masalah/kendala bagi perusahaan dalam memulai dan melaksanakan investasi di Batam.

## 2 Dasar Teori dan Penelitian Sebelumnya

### Teori Lokasi

Menurut Soepono (1999) teori lokasi pada dasarnya merupakan ilmu yang menjelaskan di mana dan bagaimana suatu aktivitas ekonomi memilih lokasinya secara optimal. Dengan demikian keputusan lokasi merupakan keputusan tentang bagaimana perusahaan memutuskan dimana lokasi pabriknya atau fasilitas-fasilitas produksinya secara optimal. Faktor-faktor lokasi merupakan faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi suatu aktivitas ekonomi seperti aktivitas produksi atau aktivitas pemberian jasa.

Tiap organisasi dari aktivitas ekonomi dipengaruhi oleh faktor-faktor lokasi. Faktor-faktor lokasi yang dimaksud adalah faktor sejarah, faktor transportasi, faktor sumber daya, faktor pasar, faktor tenaga kerja, faktor energi, faktor *aglomerasi*, faktor kenyamanan (mutu hidup, kualitas hidup, atau gaya hidup), pelayanan publik setempat, pajak, insentif pemerintah, iklim bisnis setempat *site costs* (harga tanah & gedung, fasilitas perkantoran dan gudang), stabilitas serta iklim politik nasional (Soepono, 1999:7).

Faktor-faktor tersebut kemudian dikelompokkan menjadi dua orientasi, yakni lima faktor pertama kecuali faktor sejarah, disebut orientasi transportasi dan faktor-faktor lainnya disebut orientasi masukan lokal. Faktor-faktor yang termasuk orientasi

transportasi adalah faktor-faktor lokasi klasik, sedangkan yang termasuk orientasi masukan lokal adalah faktor-faktor lokasi *kontemporer* atau modern (Soepono, 1999:7).

### Teori Lokasi Klasik

Disebut juga teori orientasi biaya transpor. Menurut teori lokasi klasik terdapat 3 (tiga) kemungkinan lokasi yakni lokasi bahan baku, lokasi pasar (kota) dan lokasi antara (lokasi bahan baku dan lokasi kota/pasar). Bila biaya transpor bahan baku dari lokasi bahan baku ke lokasi pabrik/ perusahaan lebih besar daripada biaya transpor barang jadi (lokasi pabrik ke lokasi pasar/kota), perusahaan akan menempatkan lokasi pabriknya di lokasi bahan baku agar dapat meminimumkan total biaya transpor atau memaksimalkan keuntungan sebagai motif ekonomi. Sebaliknya bila transpor barang jadi lebih besar daripada biaya transpor bahan baku, perusahaan memilih lokasi pabrik di dekat lokasi pasar/kota, sebab kalau tidak, perusahaan akan membayar biaya transpor barang jadi lebih banyak (Weber, 1999; Losch, 1954; Isard, 1956; Smith, 1981; Beckmann and Thisse, 1986; O'Sullivan, 1993; Soepono, 2002:4; Wahyuddin, 2004: 12).

### Teori Lokasi Modern

Disebut juga teori orientasi pada input lokal. Pengertian input lokal adalah apabila input itu tidak dapat dipindah-pindahkan secara efisien dari suatu lokasi ke lokasi lain. Sebuah perusahaan berorientasi input lokal bila perusahaan itu mengeluarkan sebagian besar total biayanya untuk input lokal tersebut. Perusahaan itu akan memilih lokasi dengan harga input yang rendah (Soepono, 2002: 7-9; Wahyuddin, 2004: 14-16).

Tabel 1 Ringkasan Lokasi Industri Klasik dan Modern

**1. Orientasi Biaya Transpor (Teori Lokasi Klasik)**

<b>Orientasi Biaya Transpor</b>	<b>Karakteristik Perusahaan</b>	<b>Lokasi Optimal</b>
Bahan Baku	Volume lebih besar, berat, dan tidak tahan lama sebelum diproses	Dekat dengan sumber bahan baku
Pasar	Volume lebih besar, berat, tidak tahan lama setelah diproses	Dekat pasar

**2. Orientasi pada Input Lokal (Teori Lokasi Modern)**

<b>Orientasi Biaya Input</b>	<b>Karakteristik Perusahaan</b>	<b>Lokasi Optimal</b>
Orientasi tenaga kerja	Intensifikasi tenaga kerja	Daerah tenaga kerja yang murah
Orientasi energi	Intensifikasi energi	Daerah energi murah
Orientasi input intermedia	Aglomerasi lokalisasi dan aglomerasi urbanisasi	Mengelompok pada satu lokasi yang sama
Orientasi jasa dan pajak	Kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpengaruh terhadap pemilihan lokasi	Dekat sarana publik, bebas pajak & retribusi
Orientasi kenyamanan	Para pekerja sensitif terhadap cuaca, suasana yang kondusif, dan rekreasi	Lingkungan fisik dan sosial yang menarik

Sumber : Wahyudin (2004)

Menurut Wahyuddin (2004) teori lokasi kemudian berkembang dimana salah satunya adalah teori lokasi modern lanjutan sebagai koreksi dari kelemahan teori klasik. Selain itu juga muncul teori lokasi berdasarkan perspektif geografi ekonomi. Menurut perspektif geografi ekonomi, aktivitas industri membutuhkan fasilitas fisik, bangunan, instalasi permesinan, perlengkapan dan faktor lingkungan kerja (Permadi, 1991:36-40; Sigit, 1982:27-28; Wahyuddin, 2004:28). Sejumlah faktor menentukan munculnya industri di suatu wilayah, antara lain faktor ekonomis, historis, manusia, politik, dan faktor geografis dimana faktor geografis terdiri atas bahan mentah, sumber tenaga, suplai tenaga kerja, suplai air, pemasaran dan fasilitas transportasi (Robinson, 1979:183-188, Wahyuddin, 2004:28).

Kajian lokasi industri sebagaimana dikemukakan Weber (1909), bertujuan untuk menemukan lokasi optimal (*optimum location*) bagi setiap pabrik atau industri, yaitu lokasi yang terbaik secara ekonomis

yakni biaya yang paling rendah atau pendapatan yang paling tinggi. Karena itu teori lokasi biasanya dibagi menjadi dua jenis yang membahas *least cost location* dan yang membahas *maximum revenue locations* (McCrill, 1970:87; Wahyuddin, 2004:30).

**Teori Motivasi FDI**

Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan aliran arus modal yang berasal dari luar negeri yang mengalir ke sektor swasta baik yang melalui investasi langsung (*direct investment*) maupun investasi tidak langsung berbentuk portofolio. Investasi langsung (*direct investment*) merupakan investasi yang melibatkan pihak investor secara langsung dalam operasional usaha yang dilaksanakan, sehingga dinamika usaha yang menyangkut kebijakan perusahaan yang ditetapkan, tujuan yang hendak dicapai, tidak lepas dari pihak yang berkepentingan (investor asing). Sedangkan investasi tidak langsung (*portofolio*) merupakan investasi keuangan yang dilakukan di luar negeri. Investor membeli utang atau

ekuitas, dengan harapan mendapat manfaat finansial dari investasi tersebut. Bentuk investasi portofolio yang sering ditemui adalah pembelian obligasi/saham dalam negeri oleh orang/perusahaan asing (Suyatno, 2003: 72, Didit&Indah, 2005: 26-47).

Menurut Pangestu (1995) terdapat tiga sumber utama modal asing dalam suatu negara yang menganut sistem perekonomian terbuka, yaitu pinjaman luar negeri (*debt*) dimana pinjaman luar negeri dilakukan oleh pemerintah secara bilateral maupun multilateral. Kedua adalah penanaman modal asing langsung (*Foreign Direct Investment/FDI*) dimana FDI merupakan investasi yang dilakukan swasta asing ke suatu negara, berupa cabang perusahaan multinasional, anak perusahaan multinasional, lisensi, *joint ventura*. Ketiga adalah investasi portofolio merupakan investasi yang dilakukan melalui pasar modal (Didit&Indah, 2005 : 26-47).

Terdapat beberapa motivasi FDI masuk ke dalam suatu negara atau daerah, menurut UNCTAD (1998) terdapat 3 (tiga) alasan untuk melakukan investasi antara lain *market-seeking*, *resource-seeking* dan *efficiency-seeking*. Motivasi *market-seeking* FDI bertujuan untuk menembus pasar negara domestik dan umumnya dihubungkan dengan ukuran pasar dan pendapatan per kapita, pertumbuhan pasar, akses ke pasar global dan regional, struktur dan pilihan konsumen pasar domestik. Motivasi *resource-asset* dari FDI berdasarkan alasan harga bahan baku, menurunkan biaya tenaga kerja, angkatan kerja, tenaga kerja terampil, infrastruktur fisik (pelabuhan, jalan, dan telekomunikasi), dan teknologi. Sedangkan *efficiency-seeking* FDI karena dimotivasi untuk menciptakan sumber daya saing yang baru bagi perusahaan serta karena biaya-biaya produksi yang lebih rendah termasuk juga pertimbangan produktivitas. Menurut Dunning (1993) terdapat 4(empat) alasan atau motivasi FDI masuk ke suatu negara, *resource seekers*, *efficiency seekers*, *the strategic assets or capability seekers*, serta *market seekers*.

### Penelitian Sebelumnya

Studi Masood A Badri (2007) menggunakan

survei ke industri di 23 negara dan mendukung untuk memberikan instrumen yang valid dalam membantu studi dan dukungan untuk keputusan lokasi industri. Paper ini menggambarkan studi yang menghasilkan suatu instrumen untuk mengidentifikasi kumpulan 14 faktor kritis atas lokasi industri yang telah dikembangkan dan disintesis dari literatur. Faktor kritis yang tersebut antara lain faktor transportasi, tenaga kerja, *raw materials*, pasar, kawasan industri, ketersediaan *utilitas*, kondisi pemerintah, struktur pajak, iklim, dan masyarakat serta situasi politik, kompetisi global, regulasi pemerintah dan faktor-faktor ekonomi.

Studi Fuad Erdal & Ekrem Tatoglu (2002) menjelaskan determinasi yang berhubungan dengan lokasi atas FDI dengan pendekatan analisis *time series* atas faktor lokasi utama yang mempengaruhi atas tingkat aliran FDI untuk periode tahun 1980-1998 di Turki. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel penjelas yang signifikan berpengaruh positif terhadap variabel dependen FDI adalah ukuran *market domestic*, perdagangan luar negeri, infrastruktur dan daya tarik domestik. Ketidakstabilan nilai tukar berpengaruh negatif dan signifikan, ketidakstabilan ekonomi tidak signifikan.

Faktor-faktor apakah yang menentukan investor asing mau menempatkan dana dan usahanya di suatu wilayah? Studi Khasanah & Kurniawan (2005) secara khusus menganalisis faktor-faktor penentu investasi asing langsung dalam memilih lokasi industri manufaktur di tingkat kabupaten/kota di Pulau Jawa. Faktor-faktor penentu tersebut adalah faktor tenaga kerja, faktor pasar, faktor efek aglomerasi, infrastruktur, waktu dan *heterogenitas regional*. Dalam penelitian ini terlihat bahwa variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap pemilihan lokasi FDI adalah variabel *dummy* metropolitan, perpajakan, dana kredit domestik, dan *market size* serta faktor ketersediaan tenaga kerja. Namun faktor yang berhubungan dengan pasar menjadi faktor utama bagi FDI untuk menentukan lokasinya (*market seeker*).

Studi Shaukat Ali dan Wei Guo (2005) menggunakan metode survei terhadap 22 industri di China. Faktor-faktor yang dianggap mempengaruhi

keputusan investor di China antar lain *market size*, *growth*, nilai tukar, pengembalian investasi, kebijakan insentif pemerintah, stabilitas politik, strategi global dari perusahaan, ekspor, teknologi & infrastruktur. Kesimpulan dari studi ini adalah *market size* merupakan faktor utama FDI khususnya perusahaan US. Faktor penentu penting lainnya: kebijakan insentif pemerintah, biaya tenaga kerja dan tingkat pengembalian investasi yang tinggi. Penemuan lain adalah strategi global merupakan alasan berinvestasi di China.

Studi Nguyen Ngoc Anh & Nguyen Thang (2006) menggunakan analisis regresi atas faktor penentu distribusi spasial FDI antar Propinsi di Vietnam menghasilkan pasar, tenaga kerja dan infrastruktur merupakan faktor penting dalam menarik investasi. Studi ini menggunakan *FDI inflow* sebagai variabel dependen, sedangkan variabel-variabel independen antara lain *market*, tenaga kerja, infrastruktur dan kebijakan pemerintah.

### 3 Data

Sumber data primer berasal dari responden 25 perusahaan dalam 8 kawasan industri di Batam dengan tujuan untuk mengidentifikasi motivasi dan kendala perusahaan dalam memilih lokasi investasi di Batam. Metode survei yang digunakan adalah *convenience sampling* yakni prosedur untuk mendapatkan unit sampel menurut keinginan peneliti. Sampel *convenience* sering digunakan dalam penelitian eksploratif dan deskriptif dan termasuk jenis sampel *nonprobabilitas* (Kuncoro, 2003: 119).

Untuk mengidentifikasi alasan atau motivasi bagi perusahaan dalam memilih lokasi investasi, untuk mengetahui bagaimana pandangan perusahaan terhadap masalah atau kendala investasi menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan prosentase terbesar (*modus*) dari hasil kuisioner yang direkapitulasi dari responden. Untuk merangkum pandangan pengelola kawasan industri terhadap masalah atau kendala yang dihadapi dalam melakukan investasi di Batam menggunakan metode deskriptif analisis dengan merekapitulasi hasil wawancara serta hasil informasi yang diperoleh.

## 4 Hasil Penelitian

### Motivasi Perusahaan dalam Memilih Lokasi Investasi di Batam

Pandangan responden tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bagian:

- a. Memandang bahwa faktor-faktor berikut sangat penting dalam pertimbangan memilih lokasi perusahaan di Batam, dengan urutan dari modus (diukur dari prosentase terbesar) terbesar, yakni tenaga kerja (52%), faktor biaya (52%), administrasi perijinan (52%), perlunya insentif pajak (44%), pentingnya FTZ di Batam (52%), dan kedekatan dengan Singapura (52%). faktor market (40%)
- b. Memandang bahwa faktor-faktor berikut penting dalam pertimbangan memilih lokasi perusahaan di Batam, dengan urutan dari modus terbesar yakni, transportasi (52%), infrastruktur (48%) dan stabilitas makro (44%).

Untuk meneliti lebih lanjut hal-hal alasan lain dalam melakukan pemilihan lokasi perusahaan di Batam, maka dalam penelitian ini telah dihasilkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Hal-hal yang terkait dengan Faktor tenaga kerja  
Terkait dengan faktor tenaga kerja, sebagian besar responden menyatakan bahwa ketersediaan tenaga kerja perempuan (34%) dan tenaga kerja trampil (34%) merupakan alasan utama dibandingkan dengan masalah lainnya.
- b. Hal-hal yang terkait dengan Faktor Infrastruktur  
Terkait dengan faktor infrastruktur, sebagian besar responden menyatakan bahwa daya listrik (40%) dan ketersediaan air (35%) merupakan alasan utama dibandingkan dengan masalah yang lainnya.
- c. Hal-hal yang terkait dengan Faktor Market  
Terkait dengan faktor market, responden menyatakan bahwa kepentingan ekspor (48%) dan akses ke pasar regional/ global (45%) merupakan alasan utama dibandingkan dengan pasar domestik dan populasi penduduk .
- d. Hal-hal yang terkait dengan Faktor Biaya

Terkait dengan biaya menjadi pertimbangan, secara berurutan masing-masing adalah sewa lahan (24%), air (20%), listrik (20%), biaya kawasan (18%), dan biaya administrasi/perijinan (18%).

- e. Hal-hal yang terkait dengan Faktor Transportasi  
Terkait dengan faktor transportasi, sebagian besar responden menyatakan bahwa ketersediaan fasilitas pelabuhan (41%) dan adanya jasa

pengiriman (31%) merupakan alasan utama dibandingkan dengan masalah jalan dan bandara.

Tabel 2 Motivasi Responden Memilih Investasi di Batam

No	Tingkat Kepentingan	Faktor-faktor yang Berpengaruh	%s
1	Sangat Penting	Tenaga Kerja	52
		Biaya	52
		Administrasi/Perijinan	52
		Pentingnya FTZ di Batam	52
		Kedekatan dengan Singapura	52
		Perlunya Insentif Pajak	44
		Market	40
2	Penting	Transportasi	52
		Infrastruktur	48
		Stabilitas makro	44

Sumber : Data olahan primer (25 perusahaan di Batam)

#### Kendala/Masalah Perusahaan dalam Memilih

##### Lokasi Investasi di Batam

§ Faktor-faktor yang tidak menjadi kendala antara lain infrastruktur, faktor market dan kedekatan dengan Singapura. Sedangkan faktor tenaga kerja, biaya, transportasi, insentif pajak, FTZ Batam dan sabilitas makro ekonomi ditanggapi biasa.

§ Sedangkan faktor-faktor yang dianggap menjadi kendala dalam berinvestasi adalah masalah administrasi dan perijinan. Ketidakpastian penerapan FTZ di Batam berpotensi menjadi kendala investasi karena sebagian bagi besar responden (56%) kebijakan tentang FTZ di Batam akan sangat mempengaruhi investasi di Batam.

Tabel 3 Kendala dalam Memulai dan Melaksanakan Investasi di Batam

No	Tingkat Kendala	Faktor-faktor yang Menjadi Kendala	%
1	Tidak Terkendala	Market	44
		Infrastruktur	32
		Kedekatan dengan Singapura	32
2	Biasa	Stabilitas makro	60
		Biaya	56
		Transportasi	48
		Tenaga Kerja	40
		Insentif Pajak	34
3	Terkendala	Administrasi/Perijinan	36
		FTZ di Batam	28

Sumber : Data olahan primer (25 perusahaan di Batam)

Di samping itu, responden juga memberikan pandangan lain agar iklim investasi di Batam menjadi lebih baik, pandangan-pandangan tersebut antara lain :

- o Masalah kepabeanean, dalam hal ini responden mengharapkan agar prosedur tentang kepabeanean



dipermudah, juga terkait dengan proses impor bahan baku.

- o Masalah perpajakan, diharapkan agar *tax holiday* diterapkan di Batam
- o Masalah perijinan, diharapkan agar prosedur perijinan dibuat transparan dan dipermudah juga terkait dengan perijinan untuk tenaga kerja asing.
- o Masalah keimigrasian, diharapkan agar masalah biaya fiskal ditinjau ulang.
- o Masalah tenaga kerja, diharapkan agar terdapat kepastian dalam penentuan UMK yang bermasalah tiap tahun.
- o Masalah lainnya, responden mengharapkan perlunya kepastian hukum di Batam terutama terkait penerapan FTZ di Batam, penerapan *One Stop Service (OSS)* perlu diefektifkan, serta masalah lingkungan.
- o Sebagian besar responden menyatakan bahwa penerapan FTZ di Batam sangat berpengaruh terhadap iklim investasi.

#### Kendala/Masalah Investasi Menurut Pengelola Kawasan Industri

Untuk mendapatkan gambaran permasalahan investasi di Batam terutama menjelang pelaksanaan *Free Trade Zone (FTZ)* Kadin Propinsi Riau telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Himpunan Kawasan Industri dengan meminta masukan dari pengelola kawasan industri. Kendala investasi menurut Pengelola Kawasan Industri adalah :

- a. Permasalahan secara umum
 

Permasalahan umum yang terkait dengan permasalahan investasi di Propinsi Kepulauan Riau dan khususnya Batam antara lain masalah birokrasi, ekonomi biaya tinggi, dan oknum keamanan. Terhadap permasalahan tersebut responden menganggap perlu adanya perijinan dalam pelayanan satu atap untuk menghapus birokrasi dan pungutan liar (pungli) yang bertujuan untuk memperjelas pengaturan sistem, prosedur, waktu dan biaya dalam berinvestasi di Batam.
- b. Masalah lainnya : Masalah perpajakan, Masalah Kepabeanan, Masalah Keimigrasian, Masalah Tenaga Kerja, dan Masalah Pertanahan

## 5 Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan

### Kesimpulan

- a. Motivasi investasi utama bagi perusahaan di Batam adalah karena faktor tenaga kerja, biaya, administrasi perijinan, pentingnya FTZ di Batam, kedekatan dengan Singapura, insentif pajak, serta *market*. Sedangkan motivasi dalam kategori penting secara berurutan adalah faktor transportasi, infrastruktur, dan stabilitas ekonomi makro.
- b. Alasan lain melakukan investasi di Batam adalah karena ketersediaan tenaga kerja perempuan dan tenaga kerja trampil (tenaga kerja), daya listrik dan ketersediaan air terkait (infrastruktur), ekspor dan akses ke pasar regional/global (*market*), sewa lahan, air, dan listrik (biaya), dan ketersediaan fasilitas perlabuhan (faktor transportasi).
- c. Masalah atau kendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam memulai dan melaksanakan investasi di Batam di mana responden menilai bahwa masalah administrasi dan perijinan serta ketidakpastian penerapan FTZ di Batam dalam beberapa tahun terakhir dianggap menjadi kendala dalam berinvestasi di Batam.
- d. Menurut pengelola kawasan industri, masalah/kendala investasi di Batam antara lain masalah birokrasi, ekonomi biaya tinggi, perpajakan, kepabeanan, keimigrasian, tenaga kerja, dan masalah pertanahan.

### Rekomendasi Kebijakan

- a. Bagi pemerintah pusat dapat melakukan kajian lebih lanjut secara *komprensif* tentang motivasi utama berinvestasi di Batam dan memasukkannya dalam regulasi yang mengatur tentang FTZ di Batam. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai salah satu referensi atau bahan kajian yang telah menghasilkan kesimpulan beberapa motivasi utama investasi di Batam.
- b. Bagi pemerintah daerah khususnya Dewan Kawasan FTZ yang telah terbentuk di Batam dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai salah satu referensi atau bahan kajian yang lebih

*komprehensif* dalam merumuskan kebijakan teknis FTZ di lapangan dimana menurut hasil penelitian ini terdapat beberapa masalah atau kendala investasi di Batam yang dikeluhkan oleh perusahaan dan pengelola kawasan industri.

- c. Bagi pengelola kawasan industri dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan masukan atau referensi untuk peningkatan pelayanan dalam kawasan industri agar dapat menarik investor ke dalam kawasan industri di Batam. Sesuai hasil penelitian pengelola kawasan industri perlu melakukan pembenahan terhadap infrastruktur atau fasilitas yang tersedia serta pelayanan di dalam kawasan industri, pentingnya pemeliharaan fasilitas kawasan yang didukung dengan biaya pemeliharaan yang kompetitif, peningkatan kualitas sarana dan pelayanan untuk peningkatan nilai ekspor, ketersediaan dan peningkatan *skill* tenaga kerja.

## REFERENSI

- Ali, Shaukat & Guo,Wei. 2005. "Determinant of FDI in China". *Journal of Global Business and Technology*, Volume 1, Number 2.
- Badri, A. Masood. 2007. "Dimensions of Industrial Location Factors: Review and Exploration". *Journal of Business and Public Affair*, Volume 1, Issue 2.
- Botri, Valerija & Škufli, Lorena. 2005. *Main Determinants of Foreign Direct Investment in the South East European Countries*. Paper prepared for the 2nd Euroframe Conference on Economic Policy Issues in the European Union : Trade, FDI and Relocation: Challenges for Employment and Growth in the European Union. June 3<sup>rd</sup>. Vienna, Austria.
- Fuad, Erdal & Ekrem, Tatoglu. 2002. "Locational Determinant of Foreign Direct Investment in a Emerging Market Economy : Evidence from Turkey". *Multinational Business Review*, Vol.10, No.1.
- Jamli, Ahmad & Firmansyah. 1998. "Analisis Fungsi Investasi pada Sektor Industri Manufaktur dan Dampak Investasi pada Kebutuhan Impor Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Volume 13 Nomor 4, hal. 50-66.
- Khasanah, Uswatun & Kurniawan, Ade, Budi. 2005. "Determinan Investasi Asing dalam Memilih Lokasi dan Polarisasi Industri Manufaktur di Pulau Jawa". *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Volume 6 Nomor 2.
- KPPOD. 2003. *Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia*. Jakarta : KPPOD.
- Kuncoro, M. & Rahajeng, Anggi. 2005. "Daya Tarik Investasi dan Pungli di DIY". *Jurnal Ekonomi Pembanguna*, Vol.10 No.5.
- Kuncoro, M. 2005. "Menanti Reformasi Iklim Bisnis Indonesia". *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial -UNISIA*, No. 55/XVIII/1/2005.
- Otorita Batam. 2006. *Profile of Industrial Estate*. Batam : Otorita Batam.
- Soepono, Prasetyo. 1999. "Teori Lokasi : Representasi Landasan Mikro bagi Teori Pembangunan Daerah". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 14, No. 4, hal. 4-44
- Soepono, Prasetyo. 2002. *Lokasi Perusahaan dan Implikasinya bagi Kebijakan*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar, 22 Juni 2002, Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Tambunan, Tulus. 2006. *Iklim Investasi di Indonesia : Masalah, Tantangan dan Potensi*". Artikel dalam [www.kadin-indonesia.or.id](http://www.kadin-indonesia.or.id)
- UNCTAD. 2004. *World Investment Report*. New York : United Nations Conference on Trade and Investment.
- Wahyuddin, Muhammad. 2004. *Dinamika Spatial Manufaktur Berorientasi Ekspor Indonesia, 1990-1999*. Unpublished PhD tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- WEF. 2005. *The Global Competitiveness Report 2005-2006*. Geneva : World Economic Forum.
- Yonathan, S., Hadi. 2001. "Analisis Vector Autoregression (VAR) terhadap Korelasi antara Pendapatan Nasional dan Investasi Pemerintah di Indonesia, 1983/1984 – 1999/2000". *Jurnal Ekonomika*, Vol.2, No. 3.
- Yudhoyono, Bambang, Susilo. 2006. *Keterangan Pemerintah tentang Kebijakan Pembangunan Daerah*. Disampaikan Presiden RI di depan Sidang Paripurna DPD-RI pada tanggal 24 November 2006.

## Biografi



H. Muhammad Zaenuddin, SSi., M.Sc. lahir di Pati Jawa Tengah pada tanggal 14 Februari 1976. Pendidikannya dari tingkat dasar sampai dengan menengah semuanya diselesaikan di daerah Pati. Karena ketertarikannya

pada pelajaran matematika sejak kecil, maka setelah lulus dari SMAN 1 Pati pada tahun 1994 penulis melanjutkan kuliah di Jurusan Matematika ITB Bandung. Ketertarikan dalam melakukan kajian sosial dan ekonomi, menuntunnya untuk menyelesaikan studi S-2 dalam bidang ilmu ekonomi di Fakultas Ekonomi UGM Yogyakarta pada tahun 2008 yang lalu.

Mantan Ketua Pemantau Forum Rektor Batam tahun 2004 ini pernah menjadi anggota KPU Kota Batam 2004-2006 dan 2008-2009. Kini tercatat sebagai Ketua Program Studi Akuntansi Politeknik Batam. Selain aktif mengajar dan menulis, dosen Politeknik Batam ini juga terlibat dalam beberapa organisasi kemasyarakatan dan keagamaan.

Beberapa karya bukunya yang telah diterbitkan antara lain *Mengurai Persoalan Ekonomi* (Tahun 2009), *Pemilukada dalam Perspektif Kajian dan Empiris* (2008), *Membangun Wacana intelektual* (2004), *Menggoyang Pikiran Menuju Alam Makna* (Tahun 2002), dan *Wisata Spiritual Menuju Tuhan* (Tahun 2001).

Beberapa hasil karya penelitiannya antara lain tulisan tentang "*Upaya Economic Engineering dalam Pengembangan Potensi Kewirausahaan*" dimuat dalam Jurnal Ilmiah Madania APTISI-Kepri (2004), penelitian tentang "*Rendahnya Kemandirian Daerah Seluruh kabupaten/Kota di Wilayah*

*Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*" dimuat dalam Jurnal Ilmiah EKO-REGIONAL (2009), penelitian tentang "*Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Investasi PMA di Batam*" dimuat dalam Majalah Ilmiah Ilmu Ekonomi dan Manajemen DISTRIBUSI (2010), penelitian tentang "*Survei Identifikasi Transaksi Ilegal di Batam*" yang didanai DP2M DIKTI (2009), penelitian tentang "*Survei Harga*

*Properti Residential (SHPR) di Pulau Batam*" kerjasama Bank Indonesia dan Politeknik Batam (2006,2007), penelitian tentang "*Pemetaan Komoditas Sektor Unggulan di Provinsi Kepulauan Riau*" (2008) kerjasama Bank Indonesia dan Politeknik Batam.